



## Kebijakan WFA Tunggu Pusat

WONOSARI—Pekab Gunungkidul masih menunggu kebijakan lanjutan berkaitan dengan pelaksanaan bekerja dari mana saja atau *work from anywhere* (WFA). Wacana itu sebagai upaya untuk penghematan anggaran di lingkup pemerintahan.

WFA muncul setelah Presiden Prabowo mengeluarkan Instruksi Presiden No.1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. Hal ini diperkuat dalam Keputusan Menteri Keuangan No.29/2025.

**Sudah mulai dipangkas tapi yang masih aman sekarang adalah Dana Alokasi Khusus fisik untuk sektor kesehatan.**

Sri Suhartanta  
Sekretaris Daerah Gunungkidul

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul Iskandar mengatakan ada wacana WFA dari Pemerintah Pusat tetapi untuk pemberlakuannya masih menunggu ketentuan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat.

"Masih menunggu instruksi lebih lanjut terkait dengan kebijakan ini," tuturnya kepada wartawan, Senin (10/2). Mengenai pelaksanaan kebijakan di daerah, maka akan menunggu keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemendagri-RB).

Sekretaris Daerah Gunungkidul Sri Suhartanta mengatakan pihaknya terus melakukan efisiensi anggaran untuk penghematan. Upaya tersebut masih berjalan hingga sekarang. "Sudah mulai dipangkas tapi yang masih aman sekarang adalah Dana Alokasi Khusus fisik untuk sektor kesehatan," ucapnya.

Sri Suhartanta menjelaskan sesuai kebijakan dari Pemerintah Pusat, maka Pekab harus melakukan rasionalisasi anggaran mencapai Rp61,2 miliar. Jumlah ini terdiri dari DAK fisik sebesar Rp42,6 miliar dan Dana Alokasi Umum sebesar Rp18,6 miliar.

"Masih kami petakan terkait dengan potensi anggaran yang harus dipangkas untuk penghematan. Yang jelas, kami akan patuhi semua instruksi dari Pemerintah Pusat," katanya. (David Kurniawan)